

# STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUHAMAD AL FAZRI

NPP. 30.0350

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Pembimbing Skripsi: Bapak Prof Dr, Drs, Bahrullah Akbar, SE, MBA, CIPM, CA, CPA, CSFA, C.FrA, CGCAE, QGIA.

## ABSTRACT

**Problem Statement :** *In maintaining an unqualified opinion the regional government of Empat Lawang Regency must present financial reports in accordance with the criteria of the Supreme Audit Agency. **Purpose:** This study aims to find out the strategy for maintaining an unqualified opinion, what obstacles exist and how the regional government and the Regional Financial and Asset Management Agency try to maintain an unqualified opinion. **Method :** The research method used is a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews, observations and documentation. Data analysis techniques namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The focus of this study uses Hamel and Prahalad's strategy theory and conducts a SWOT Analysis to determine Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats strategies. **Result:** The results of the study show that the Strategy to maintain Unqualified Opinion will be carried out by strengthening the understanding of the legal basis of accounting policies to improve the quality of financial reports, improve facilities and infrastructure as well as accounting training for human resources and carry out action plans formed by the District Head Empat Lawang in an effort to follow up on the findings in the local government financial reports with guidance from the Supreme Audit Agency so that in the future it can maintain an unqualified opinion that has been achieved by Empat Lawang Regency .**Conclusion:** The findings in the financial statements of the local government of Four Lawang Regency are one of the obstacles that are owned in addition to inadequate human resources and facilities and infrastructure causing the internal control system of the local government of Four Lawang Regency to be less effective and Improve the quality of human resources and implement the action plan that has been created by the Regent of Four Lawang Regency as an effort to overcome the findings in the financial statements Regional Government so that in the future there will be no more repeated findings.**Suggestion:** Disseminating the regulation of the Regent of Four Lawang Number 39 of 2022 concerning accounting policies and Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the establishment and preparation of regional equipment, improving infrastructure facilities in the field of accounting such as laptops or computers, wifi and training on special accounting at the Regional Finance and Asset Management Agency of Four Lawang Regency and implementing action plans well and establishing cooperation between leaders and all OPD in Four Lawang District.*

**Keywords:** *Strategy, Unqualified Opinion, Financial Statements, Local Government*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kriteria dari Badan Pemeriksa Keuangan. **Tujuan :** Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini menggunakan Teori strategi Hamel dan Prahalad dan melakukan Analisis SWOT untuk mengetahui strategi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), Ancaman (Threats).. **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang akan dilakukan dengan memperkuat pemahaman landasan legalistik kebijakan akuntansi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelatihan akuntansi bagi sumber daya manusia dan menjalankan rencana aksi (action plan) yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Empat Lawang dalam upaya menindaklanjuti atas temuan pada laporan keuangan pemerintah daerah dengan bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar kedepannya dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang telah diraih Kabupaten Empat Lawang

**Kesimpulan :** Temuan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang menjadi salah satu hambatan yang dimiliki selain itu juga sumber daya manusia dan sarana dan prasana yang kurang memadai menyebabkan sistem pengendalian intern pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang kurang efektif serta Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melaksanakan rencana aksi (action plan) yang telah diciptakan oleh Bupati Kabupaten Empat Lawang sebagai upaya dari mengatasi temuan-temuan pada laporan keuangan pemerintah daerah agar kedepannya tidak ada lagi temuan yang berulang. **Saran :** Mensosialisasikan peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 39 tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi dan peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah ,peningkatan sarana prasarana bidang akuntansi seperti laptop atau komputer, wifi dan pelatihan tentang akuntansi khusus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dan melaksanakan rencana aksi (action plan) dengan baik dan menjalin kerjasama antara pemimpin terhadap seluruh OPD di Kabupaten Empat Lawang

Kata Kunci: Strategi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada era reformasi daerah provinsi dan kabupaten/kota telah mendapatkan otonomi luas menurut undang-undang tentang pemerintah daerah yang sampai saat ini kita kenal, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan



Yudikatif. Pemerintahan negara Indonesia dikepalai oleh presiden dengan sistem desentralisasi yang artinya bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan bertanggung jawab setiap kegiatan yang dilakukan secara transparan begitu juga dengan kegiatan mengenai keuangan negara, maka pemerintah daerah wajib membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan pemerintah berpedoman kepada asas otonomi serta tugas pembantuan yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Bentuk pertanggungjawaban yang wajib disusun pada pemerintah daerah akan kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Laporan realisasi anggaran Kabupaten Empat Lawang tahun 2021 bahwa realisasi terhadap anggaran pada pendapatan sebesar Rp.1.156.708.582.650,06 kemudian direalisasikan Rp.1.057.873.519.762,13 dalam laporan realisasi anggaran (LRA) belanja Rp.962.899.336.769,76 direalisasikan Rp.860.204.917.632,00, kemudian pada transfer anggaran Rp.195.145.826.812,30 direalisasikan sebesar Rp.191.057.046.460,00 dan pembiayaan anggaran Rp.16.336.580.932,00 realisasi Rp.16.177.862.108,80. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media sosial mediainfokorupsi.com terdapat kekurangan pada 9 paket pekerjaan pada belanja pemeliharaan irigasi dan kekurangan volume pada 29 paket pekerjaan belanja modal di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan keterlambatan pekerjaan penyelesaian 15 paket pekerjaan belanja modal. Hal tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengkaji lebih jauh mengenai laporan pertanggungjawaban berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dengan penelitian yang berjudul “Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan”.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan macam faktor yang merupakan penyebab dari adanya perbedaan opini dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menurut penelitian Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang (Hottua Sipatuhar Siti, 2009), selanjutnya Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Kampar Bidang aset badan pengelola keuangan dan aset daerah melakukan pengelolaan terhadap aset tetap maupun barang yang merupakan milik daerah dengan tujuan untuk mempertahankan WTP di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Hadinur Rahman, Meyxi Heriyanto, dan Tri Sukirno Putro, 2020). Ketiga yaitu Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Wajar Tanpa Pengecualian pada Pemerintah Kota Tangerang menjelaskan Analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang dengan metode lintas waktu (time series) (Yudi

Nur Supriadi, 2017), Keempat yaitu Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa pemerintah kabupaten Lotim telah sukses dalam mempertahankan opini WTP.(Lalu Ade Gusnawan Putra, 2021)

Kelima yaitu Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pemantauan terhadap fungsi kepatuhan peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan dengan semestinya serta masih terjadi berbagai macam masalah pada tahun selanjutnya yang menggambarkan bahwa belum efektifnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil. Akan tetapi, sudah efektif pada tindakan perbaikan dan sudah sesuai rekomendasi dalam mendapatkan opini dari WTP.(Damas Ali Wijaya, Retno Sunu Astuti, Budi Puspo Priyadi, 2022). Keenam adalah Peran Akuntan

Dalam Mewujudkan Equalified Opinion Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia menjelaskan Perolehan Opini WTP bagi LKPD cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Muhsin, SE.,M.Si., Ak., CA, 2014) dan yang terakhir adalah Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten

Bandung menjelaskan Terdapat variabel yang terjadi secara parsial yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit yang mana memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Pencapaian Opini WTP (Yanti Rufaedah, 2020)

.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Perbedaan pada penelitian kali ini adalah lokus penelitian, dimana pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah di Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan Untuk mengetahui strategi mempertahankan opini WTP pada laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang serta mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam mempertahankan opini WTP pada laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang.

## **II. METODE**

Perbedaan pada penelitian kali ini adalah lokus penelitian, dimana pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian disini peneliti mengambil judul Strategi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dengan menggunakan teori SWOT Rangkuti (2019:19) sebuah analisis dengan meneliti faktor secara terstruktur untuk melakukan penyusunan strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah, Peneliti



menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menjadikan diri peneliti sendiri instrumen utama dalam melaksanakan penelitian.

Menurut Sugiyono tahun (2018) memberi pernyataan bahwa Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode yang memiliki tujuan untuk melakukan penelitian atau observasi pada sebuah kondisi alamiah sebuah objek. Instrumen utama dalam penelitian secara kualitatif adalah peneliti. Peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian.

Penelitian kualitatif menurut Neuman (2006) menyatakan bahwa : Penelitian kualitatif mengembangkan teori selama proses pengumpulan data. Metode ini lebih induktif yang berarti bahwa teori dibangun didasarkan pada data. Banyak penelitian dilakukan menggunakan metode tersebut yang membuat penelitian kualitatif fleksibel dan memungkinkan data dan teori saling berinteraksi. Peneliti kualitatif tetap terbuka untuk sesuatu yang terjadi diluar dugaan, bersedia untuk mengubah arah atau fokus penelitian, dan dapat membuat pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi penelitian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPD Kabupaten Empat Lawang**

##### **A. Kekuatan (Strength)**

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut timbul pertanyaan tentang mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian kepada informan yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Empat Lawang Bapak Iwan Mikewijaya, ST., MM menyatakan :“Untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang telah diraih BPKAD sebagai pelaksana fungsi untuk menunjang pemerintah daerah dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah dimana untuk menyusun laporan keuangan yang baik harus memenuhi kriteria dari Badan Pemeriksa Keuangan sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadikan peraturan yang dibuat Bupati tentang kebijakan akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan karena untuk mendapatkan ataupun mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian laporan keuangan diharuskan memenuhi kriteria dari Badan Pemeriksa Keuangan”.

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi acuan utama, peraturan ini menjelaskan secara rinci tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat dan pegawai yang ada di Kabupaten Empat Lawang tidak terkecuali di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang. Hasil wawancara dengan bapak H. Legiyo, SE., MM. selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengatakan :“Pejabat dan pegawai serta masyarakat Kabupaten Empat Lawang adalah pendukung dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian selama ini. Tentunya mereka mengetahui apa tugas masing-masing untuk dilaksanakan dengan harapan tidak ada tumpang tindih dalam prosesnya dan terjalin dan terciptakan koordinasi yang baik antar pegawai ataupun antar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Empat Lawang terutama di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah”.

Laporan keuangan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Empat Lawang kemudian diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk di audit sehingga dapat disajikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga

mendapatkan hasil dari pemeriksaan tersebut. meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang baik”.

Hasil beberapa wawancara tersebut peneliti bahwa kekuatan (strength) yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu peraturan Bupati 39 tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi dan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan, tugas serta fungsi masing-masing pejabat dan pegawai kemudian adanya komitmen yang tercipta untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.

## B. Kelemahan (Weakness)

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk realisasi atas penggunaan anggaran dalam hal untuk kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan sehingga mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi.

TABEL 1

Temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat

No.	Nama OPD	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	Temuan BPK-RI LHP Nomor : 35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	754.110.000,00
2.	Sekretariat DPRD	Temuan BPK-RI LHP Nomor : 35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Kelebihan Pembayaran Belanja ATK dan Makan Minum	38.425.000,00
3.	Sekretariat DPRD	Temuan BPK-RI LHP Nomor : 35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Kelebihan Pembayaran Belanja	1.402.207.928,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Temuan BPK-RI LHP Nomor : 35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Kelebihan Pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi	85.250.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Temuan BPK-RI LHP Nomor : 35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Denda Keterlambatan dan Mencairkan Jaminan Pelaksanaan pada Pengadaan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Betung Kecil Kec. Ulu Musi	371.101.145,05
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Temuan BPK-RI LHP Nomor : 35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Denda Keterlambatan Dua Paket Pekerjaan Penerangan Lampu Jalan Solar Cell	170.366.489,55
7.	RSUD Tebing Tinggi	Temuan BPK-RI LHP Nomor : 35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.491.400,00
8.	RSUD Tebing	Temuan BPK-RI LHP Nomor :	145.353.685,00



	Tinggi	35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Pemborosan Keuangan Daerah atas Pembelian Obat	
9.	RSUD Tebing Tinggi	Temuan BPK-RI LHP Nomor : 35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Kelebihan Pembayaran atas Belanja Bahan Bakar Minyak	121.053.450,00
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Temuan BPK-RI LHP Nomor : 35.C/LHP/XVIII.PLG/05/2021 T.A 2020 Terkait Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.238.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>3.205.597.097,60</b>

laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa walaupun Kabupaten Empat Lawang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian masih terdapat temuan yang sebagai (weakness).

### C. Peluang

Peluang yang ada pada strategi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian terciptanya perjanjian dan kerjasama antara stakeholder dengan seluruh pimpinan di OPD tentang penyerahan laporan keuangan sehingga tidak ada lagi keterlambatan. Kemudian, dengan menambahkan sarana dan prasarana di kantor agar menunjang pekerjaan laporan keuangan dapat berkembang agar membantu dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi Ibu Ervita, SE., AK., MM. berpendapat bahwa : “Pelaporan keuangan untuk disajikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjadi bahan pertimbangan atas opini apa yang akan diberikan kepada pemerintah daerah tentunya harus sesuai kriteria. Pencapaian kriteria tersebut tentunya harus didukung dengan adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pekerjaan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah seperti contoh adanya wifi yang memadai sehingga tidak kesulitan saat OPD lain mengirimkan laporan keuangan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang. Kemudian, adanya personal computer untuk memudahkan auditor untuk menginput data-data keuangan apalagi mengingat sekarang laporan keuangan disusun dengan aplikasi”.

Selain itu Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang Bapak H. Legiyo, SE., MM. mengatakan :“perjanjian dan kerjasama antar stakeholder dan para pimpinan yang terkait dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian seperti kepala masing-masing OPD tentunya sangat penting. Mengingat dengan perjanjian dan kerjasama mampu meningkatkan laporan keuangan dari OPD tidak terlambat dalam penyerahan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang akan mewujudkan tujuan bersama yaitu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian”.

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara diatas menjelaskan beberapa peluang yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah yang sangat penting sebagai pandangan positif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah Kabupaten Empat Lawang.

### D. Ancaman (Threats)

Ancaman yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tentang akuntansi. Melalui hasil wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi Ibu Ervita, SE., AK., MM. mengatakan bahwa :“Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang ini sendiri sedikit dalam pemahaman di bidang akuntansi sehingga diperlukan upaya dalam peningkatan kuantitas sumber daya aparatur dan kapabilitas SDM di bidang akuntansi”.

Pemadaman listrik di Kabupaten Empat Lawang adalah ancaman yang dihadapi oleh pemerintah. Hasil dari wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi Ibu Ervita, SE., AK., MM. mengatakan bahwa :“Pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Empat Lawang dikarenakan sering terjadi kerusakan gardu dan tiang listrik yang disebabkan oleh pohon tumbang ataupun cuaca. Efek pemadaman ini sendiri sangat besar apalagi saat auditor sedang menginput laporan keuangan sehingga sering terjadi penundaan”.

Uraian diatas merupakan ancaman yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah yang mana BPKAD sebagai pelaksana fungsi urusan penunjang pemerintah daerah pada pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **3.2. Faktor Penghambat Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang**

#### **A. Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Hambatan yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yaitu efektivitas sistem pengendalian intern. Uraian di atas menjelaskan bagaimana dalam sistem pengendalian intern masih belum optimal.

#### **B. Sumber Daya Manusia/ Aparatur**

Penghambat dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian juga disebabkan oleh sumber daya manusia/aparatur yang masih minim pemahaman tentang akuntansi sehingga menyebabkan

#### **C. Ketidapatuhan Perundang-Undangan**

Tidak patuh terhadap undang-undang dalam penyusunan laporan keuangan dapat menghambat pemerintah daerah untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian

### **3.3. Upaya Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang**

#### **A. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022**

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang yaitu dengan mensosialisasikan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 39 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi agar sumber daya manusia/aparatur memahami tentang akuntansi dan bagaimana cara pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Peraturan Bupati ini berisi tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mampu menjadikan pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan.



#### B. Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern sangat penting diperhatikan untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, pada efektivitas sistem pengendalian intern masih banyak kelemahan sehingga perlu dilakukan pengawasan. Badan Pengelola Keuangan sendiri selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) akan melakukan inventarisasi seluruh rekening milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk ditetapkan dengan SK Bupati dan melakukan pemantauan asal usul penerimaan jasa giro yang masuk ke rekening Kas Daerah pada PT Bank Sumsel Babel dan Membuat kesepakatan bersama dengan Bank Sumsel Babel terkait pembukaan rekening giro oleh OPD beserta unit-unit di bawahnya dengan persyaratan wajib melampirkan surat rekomendasi dari BUD atas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

#### C. Rencana Aksi (*action plan*)

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian namun didalam laporan keuangan tersebut masih banyak temuan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang membuat sebuah rencana aksi (*action plan*) atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan

### 3.4. Diskusi Temuan Utama

Opini Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak enam kali dari tahun 2016 hingga 2021. Selama Kabupaten Empat Lawang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut, masih memiliki kekurangan dan kelemahan pada pengelolaan keuangan daerah. Karena masih terdapat temuan yang harus ditindak lanjuti. Sehingga, pemerintah daerah masih harus terus berbenah untuk memperbaiki dari tahun ke tahun. Temuan tersebut berupa realisasi anggaran yang masih terdapat kekurangan volume salah satunya belanja modal pada proyek pekerjaan yang menunjukkan kekurangan volume paket belanja modal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang tahun 2021 masih terdapat temuan.

Berdasarkan berbagai sumber referensi penelitian terdahulu judul penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya, akan lebih diperjelas dengan fokus penelitian. Fokus penelitian disusun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan pada enam tahun sebelumnya. Adapun terdapat perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai sumber referensi.

## IV. KESIMPULAN

Temuan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang menjadi salah satu hambatan yang dimiliki selain itu juga sumber daya manusia dan sarana dan prasana yang kurang memadai menyebabkan sistem pengendalian intern pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang kurang efektif serta Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melaksanakan rencana aksi (*action plan*) yang telah diciptakan oleh Bupati Kabupaten Empat Lawang sebagai upaya dari mengatasi temuan-temuan pada laporan keuangan pemerintah daerah agar kedepannya tidak ada lagi temuan yang berulang **Keterbatasan Penelitian**. Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti,

sehingga hanya dapat dilakukan pada satu Kabupaten saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Kabupaten Empat Lawang untuk menemukan hasil yang mendalam terutama pada Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Empat Lawang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B & Djazuli, A. (2015). Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*.
- Fallis, A. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Hottua Sipatuhar Siti, (2009) Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang
- Rahman, Hadinur, Meyzi Heriyanto, dan Tri Sukirno Putro. (2020). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16(1):124–30.
- Sipahutar, Hottua, Siti Khairani, and S. E. Ak M. Si. (2009). Kabupaten Empat Lawang.
- Muhsin, SE.,M.Si., Ak., CA, (2014) Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Equalified Opinion Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia
- Rangkuti, F. (2018). *SWOT Balanced Scorecard*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Yudi Nur. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pemerintah Kota Tangerang. *Forum Keuangan Dan Bisnis* V 153–58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah